

**PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM
MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN DI SUDAN SELATAN TAHUN 2016-2019**

Oleh : Satri Syafira

Email : satrisyafira11@gmail.com

Pembimbing : Dr. Mhd. Saeri, M.Hum

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research analyzes how the ICRC's role in handling humanitarian crises that occurred due to civil conflict in South Sudan. The civil conflict occurred after South Sudan's independence in 2011, which then triggered the upheaval of armed conflict. This indicated a serious humanitarian crisis due to the conflict. Despite the establishment of a peace agreement in 2015, civil conflict still continues across the country targeting civilians. The ICRC as an organization engaged in the humanitarian field took a big part in handling the humanitarian crisis in South Sudan, until it formed the South Sudan Red Cross after its independence in 2011. The ICRC carries out its humanitarian mission through several programs which then have a significant impact in dealing with the humanitarian crisis there.

This research uses a qualitative method, with data collection techniques through literature studies and document analysis from several books, journals, articles, annual reports, and websites with a group level of analysis. This research utilizes Constructivism perspective and Humanitarian Diplomacy theory.

The results of this paper indicate that in handling the humanitarian crisis in South Sudan, the ICRC maintains stability and effectiveness in carrying out its humanitarian mission. This can be seen from the achievements made by the ICRC in the span of 2016-2019 which based on its annual report reached a high effective level.

Keywords: Civil Conflict, Humanitarian Crisis, ICRC, Humanitarian Diplomacy.

PENDAHULUAN

Sudan Selatan merupakan salah satu negara yang terletak di benua Afrika, di mana memiliki batas yang berhadapan langsung dengan Sudan, Afrika Tengah, Kongo, dan beberapa negara lainnya di Kawasan Afrika. Negara ini resmi merdeka tepatnya pada tahun 2011 dengan berbagai konflik dan problematika yang seringkali terjadi didalamnya¹. Sudan Selatan menjadi negara yang hancur oleh konflik, hal ini pun berimbas terhadap pengembangan infrastruktur dasar, sumber daya manusia, dan lembaga sipil formal.

Setelah kemerdekaannya tercapai, di penghujung tahun 2013 konflik internal pecah di Sudan Selatan akibat persaingan yang terjadi antara Salva Kiir (presiden Sudan Selatan) dan wakilnya Rick Machar. Konflik di Sudan Selatan kembali terjadi yang berlangsung antara pasukan pemerintah melawan oposisi sehingga menyebabkan terjadinya konflik bersenjata². Meskipun perjanjian damai ditandatangani pada tahun 2015 oleh pihak yang terlibat dalam pertikaian dan konflik, namun pada Juli 2016 negara ini pun kembali menghadapi krisis kemanusiaan yang cukup serius sehingga menjadi ancaman yang tak terkendalikan dan mempengaruhi stabilitas kawasan negara.

Keadaan di Sudan Selatan kembali mengalami situasi yang buruk pada tahun 2016, di mana menyebabkan perpindahan massal di Juba. Akibat dari konflik selama beberapa dekade yang kemudian menyebabkan rasa tidak aman dan ketidaknyamanan, terjadinya pemindahan massal, dan keterbatasan investasi

pemerintah yang menyebabkan lemahnya sistem kesehatan, hingga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya sebagai bentuk krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan Selatan.

Tercatat pada Juli hingga September 2016 di mana terdapat 185.000 orang melarikan diri dari Sudan Selatan setelah terjadinya konflik terakhir³. Ini menunjukkan gagalnya berbagai modal fisik yang berimbas kepada pembangunan mendasar Sudan Selatan.

International Committee of the Red Cross atau yang dikenal dengan ICRC merupakan salah satu organisasi khusus yang bersifat netral, imparial dan independen yang beranggotakan perorangan, yang kemudian memiliki mandat dari hukum internasional. ICRC telah hadir di Sudan Selatan pada tahun 1980 hingga membentuk *South Sudan Red Cross* (SSRC) pada pertengahan tahun 2011 setelah resmi merdeka⁴. Selain itu, ICRC mengambil andil besar dalam memberikan program bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan.

ICRC memiliki kepribadian hukum internasional yang fungsional dengan karakter terbatas sehingga didirikan sebagai sebuah organisasi khusus yang bergerak di bidang kemanusiaan⁵. ICRC memiliki mandat dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan terkait bantuan kemanusiaan dan berupaya dalam mempromosikan serta memperkuat hukum humaniter dan prinsip kemanusiaan secara universal yang bersesuaian dengan Konvensi Jenewa 1949 No. 4 yang mengatur tentang perlindungan orang sipil di waktu perang.

ICRC masuk ke Sudan Selatan dengan menawarkan diri secara sukarela

¹ Frederick Appiah Afriyie et al. "Comprehensive Analysis of South Sudan Conflict: Determinants and Repercussions." *Journal of Liberty and International Affairs* 6, no. 1 (2020): 34-38.

² Candida Silva. "From Principles to Actions? An Analysis of The (in) Coherence in the Responses of The International Community to The Humanitarian Crises in Yemen and South Sudan." Thesis, (2018): 14.

³ Agustino Ting Mayai. "War and Schooling in South Sudan." *Journal on Education in Emergencies* 8, no. 1 (2022): 15.

⁴ ICRC *Annual Report* 2016, 194.

⁵ Mujahadah. "Upaya ICRC dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional di Sudan Selatan pada Tahun 2013-2018." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2019): 6-7.

melalui diplomasi kemanusiaan serta memberikan dukungan dan saran teknis kepada pemerintah Sudan Selatan selama proses akses. Sudan Selatan telah mengakses Konvensi Jenewa 1949 dan protokol-protokol tambahan pada Juli 2012 tepatnya satu tahun setelah negara ini merdeka⁶.

ICRC memiliki hak untuk menawarkan jasanya kepada pihak-pihak dalam konflik bersenjata non-internasional. Konflik sipil di Sudan Selatan dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional, hal ini dikarenakan konflik tersebut terjadi dalam wilayah negara Sudan Selatan antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak.

Pada dasarnya, selain menjalankan tugas di bidang kemanusiaan ICRC juga mengambil peran sebagai promotor hingga menjadi pionir yang menegakkan hukum humaniter internasional, di mana hukum inilah yang mengatur tatanan perang meliputi perlindungan korban yang terluka akibat perang, terlantar, dan juga tahanan perang termasuk kombatan hingga masyarakat sipil yang terdampak dalam konflik ataupun perang yang terjadi di suatu negara⁷.

KERANGKA TEORI

Perspektif Konstruktivisme

Penelitian ini dilakukan dengan berpedoman pada teori konstruktivisme dalam perspektif Alexander Wendt, di mana teori ini dianggap dapat menguraikan serta menjelaskan kebutuhan dunia internasional akan sebuah organisasi kemanusiaan yang dapat menjaga keberlangsungan Hukum Humaniter Internasional sekaligus melindungi korban

yang terdampak dari konflik bersenjata.⁸ Dalam hal ini, teori konstruktivisme dapat menjelaskan tentang adanya keterkaitan interaksi *power* dan institusi internasional. ICRC berhak menempati suatu daerah yang berkonflik dan diyakini dapat melindungi korban yang terdampak konflik yang berasal dari pihak sipil.

Menurut Wendt, struktur sosial mencakup tiga elemen penting yaitu struktur sosial yang dijelaskan oleh pemahaman, dilema keamanan yang terdiri atas penahanan intersubjektif, dan komunitas keamanan yang merupakan hasil pemikiran bersama⁹.

Dalam penelitian ini, ICRC dijadikan sebagai aktor yang mana ICRC merupakan sebuah organisasi yang diperkuat statusnya oleh hukum melalui Konvensi Jenewa dan didalamnya juga dijelaskan bahwa terdapat mandat ICRC adalah sebagai penjaga hukum humaniter internasional itu sendiri. Kemudian, objek penelitian yang menjelaskan dalam studi kasus ini adalah Negara Sudan Selatan di mana negara ini membutuhkan suatu institusi yang netral dan tidak terdapat keberpihakan dalam melindungi pihak kombatan maupun non-kombatan yang merupakan pihak sipil dalam konflik yang terjadi.

Teori Humanitarian Diplomacy

Diplomasi kemanusiaan (*humanitarian diplomacy*) menjadi salah satu dimensi diplomasi, di mana memiliki karakter yang berbeda dibanding diplomasi pada umumnya. Diplomasi kemanusiaan bertujuan untuk menyelamatkan manusia tanpa adanya tindakan diskriminatif terhadap ras, suku, agama, gender, keyakinan politik, dan warga negara. ICRC menjadi organisasi yang banyak terlibat dalam konflik untuk melindungi dan membantu korban akibat konflik

⁶ ICRC. "South Sudan: World's Newest Country Signs Up to the Geneva Conventions." (2012), Dilansir dari <https://www.icrc.org> pada 20 Februari 2022.

⁷ S. C. Guisolan et al. "Health and Security Risks of Humanitarian Aid Workers During Field Missions: Experience of the International Red Cross." *Journal of Travel Medicine and Infectious Disease* 46, (2022): 1-2.

⁸ Rika Isnarti. "A Comparison of Neorealism, Liberalism, and Constructivism in Analysing Cyber War." *Andalas Journal of International Studies* 5, no. 2 (2016): 155-157.

⁹ *Ibid.*

secara netral dan tidak memihak yang kemudian melakukan diplomasi kemanusiaan dan aksi pencegahan korban akibat konflik secara terus menerus¹⁰.

Diplomasi kemanusiaan merupakan strategi untuk mempengaruhi pihak-pihak dalam konflik bersenjata dan lainnya meliputi negara, aktor non-Negara dan anggota masyarakat sipilnya. Tujuan dari diplomasi ini adalah murni bersifat kemanusiaan dan mencakup pengembangan jaringan hubungan bilateral atau multilateral yang erat, resmi atau tidak resmi dengan para protagonis konflik bersenjata dan gangguan, aktor non-Negara atau agen berpengaruh. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan penderitaan korban yang terdampak dari konflik bersenjata, dukungan untuk aksi kemanusiaan ICRC dan penghormatan terhadap hukum humaniter¹¹. Diplomasi ini dilakukan sebagai perantara netral di antara mereka dan dalam membantu menyiapkan dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter.

Diplomasi kemanusiaan ICRC juga khas karena memiliki satu tujuan kemanusiaan yang terbatas untuk mencegah dan mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh konflik bersenjata, dengan membuat pihak-pihak yang berkonflik sadar akan tanggung jawab mereka dan memberikan bantuan langsung kepada para korban sesuai kebutuhan. Aspek mencolok lainnya dari diplomasi kemanusiaan adalah dari segi independensinya. ICRC melakukan diplomasi dari kantor pusatnya yang berada di Jenewa, dan dari delegasi ataupun misinya tidak semuanya berada di negara-negara konflik¹².

¹⁰ Ambarwati, dkk. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), 126-127.

¹¹ Marion Harroff-Travel. "The Humanitarian Diplomacy of the International Committee of the Red Cross." *Journal French in Relations Internationales*, no. 121 (Januari-Maret 2005): 4-5. Dilansir dari <https://www.icrc.org>.

¹² *Ibid*, 6.

Secara garis besar, ICRC menjalankan diplomasi kemanusiaan di Sudan Selatan yang terdiri dari aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mendekati para pengambil keputusan, para pembentuk opini, untuk bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan orang-orang yang terdampak krisis kemanusiaan dan konflik, melalui cara yang sejalan dengan hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Adapun bentuk dari diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh ICRC adalah dengan memberikan bantuan kemanusiaan yang berupa bantuan logistik, pangan, pasokan kebutuhan rumah tangga, menyediakan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, dan jasa-jasa lainnya¹³.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pengolahan data sekunder. Dikarenakan data yang dikumpulkan oleh penulis mayoritasnya dalam bentuk studi kasus yang berwujud deskriptif. Oleh sebab itu, penulis dalam membahas dan menganalisis peran ICRC dalam menangani krisis kemanusiaan di Sudan Selatan, penulis akan mendeskripsikan langsung data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel, surat kabar, situs internet yang kemudian akan disaring dan diklasifikasikan kembali sesuai dengan materi atau topik yang dibahas.

Dalam memudahkan proses untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian ini, sehingga diperlukannya data-data aktual, valid dan juga komprehensif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi riset kepustakaan (*Library Research*). Tentunya data yang terkumpul akan dianalisis serta dikaitkan relevansinya dengan peran ICRC dalam menangani

¹³ *Ibid*.

serta menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan

Hakikatnya, krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan Selatan berawal dari konflik sipil yang kemudian mengakibatkan pecahnya kekerasan di Kota Juba pada Juli 2016. Kerusuhan yang terjadi secara terus menerus ini telah mengikis sistem pendidikan dan politik serta memperburuk ekonomi lokal, menyisakan sedikit dan bahkan tidak ada struktur kelembagaan yang memberikan layanan atau memfasilitasi pengambilan keputusan¹⁴. Ditambah dengan tingkat kelaparan yang meningkat dan krisis lainnya, hal ini telah memperburuk situasi kemiskinan yang ekstrim dan ketidakamanan di negara tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang mengindikasikan terjadinya konflik sipil di Sudan Selatan yang berimbas kepada krisis kemanusiaan di sana. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik sipil pasca kemerdekaan Sudan Selatan adalah perebutan kekuasaan internal, keterlibatan pihak eksternal dalam eksportir senjata, persaingan kelompok etnis, dan tatanan pemerintahan yang lemah hingga korupsi.

Akibat konflik sipil yang terjadi, kelemahan institusional diperburuk dengan terjadinya kekerasan, pengangguran, buta huruf, kemiskinan ekstrim yang mempengaruhi warga sipilnya. Selain itu, konsekuensi dari konflik sipil ini tidak hanya berakibat pada pengungsian eksternal dan internal saja, namun juga mengakibatkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama pengungsian internal untuk tantangan kesehatan masyarakat yang berbeda. Ini dibuktikan dengan adanya jumlah korban jiwa yang tewas mencapai

10.000 orang sejak konflik dimulai, penghancuran berbagai infrastruktur seperti sekolah dan fasilitas kesehatan, penjarahan harta benda menjadi rutinitas dan menyebar luas¹⁵.

Tidak hanya itu, bahkan terdapat kasus pemerkosaan perempuan oleh anggota bersenjata, militan dilaporkan oleh media, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hingga praktik berat lainnya yang merupakan pelanggaran HAM. Konflik kekerasan yang berlarut-larut di negara tersebut telah menghancurkan mata pencaharian, isu kelaparan yang parah, memperburuk kesehatan masyarakat dan menyebabkan penghancuran fasilitas kesehatan, hingga memberikan tekanan lebih lanjut pada sistem kesehatan yang sudah rapuh.

Peran ICRC dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan (Tahun 2016-2019)

Prioritas ICRC dalam menjalankan misinya ialah memastikan bahwa orang dapat memperoleh atau memberikan layanan kesehatan dengan aman. Melalui kerjasama ICRC dan Perhimpunan Nasional serta petugas kesehatan setempat untuk mengembangkan dan meningkatkan strategi yang lebih efektif untuk melindungi pasien dan staf medis.

ICRC bekerja secara langsung dengan masyarakat dan petugas kesehatan untuk membantu mereka memperkuat warga sipil dan pengungsi terhadap dampak kekerasan, dan meminimalisir mereka dari berbagai resiko yang terjadi akibat konflik. Sebagai penegakan HHI, ICRC memberikan perlindungan dan juga bantuan terhadap sipil sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 No. 4.

ICRC terus berupaya mengirimkan barang-barang bantuan kemanusiaan kepada komunitas yang terisolasi di tengah-tengah kendala keamanan dan

¹⁴ Manuel Contreras-Urbina, et al. "Researching Violence Against Women and Girls in South Sudan: Ethical and Safety Considerations and Strategies." *Journal Conflict and Health* 13, no. 55 (2019): 3-4.

¹⁵ Christoper D. Zambakari. "Crisis of Youth or Crisis of Society in South Sudan?." *SSRN Electronic Journal*, no. 635 (Juni 2013): 3.

logistik. Meskipun demikian, bantuan disampaikan melalui jalur darat saat musim kemarau. Bantuan juga dikirim melalui pesawat kecil yang dapat mendarat bahkan di medan yang sulit, mengangkut kebutuhan material, kebutuhan rumah tangga, dan barang-barang lain yang tidak dapat dijatuhkan dari udara. Melalui bantuan Perhimpunan Nasional dan anggota staf ICRC mengumpulkan pasokan yang dijatuhkan dari udara di beberapa titik yang telah ditentukan dan mendistribusikannya kepada warga sipil termasuk pengungsi.

Banyak dari warga sipil dan pengungsi mendapatkan kembali akses air bersih. Hal ini kemudian bersesuaian dengan otoritas lokal dan ICRC melakukan perbaikan terhadap titik pasokan air dan dukungan ICRC terhadap instalasi pengolahan air, sehingga kemudian memberi manfaat bagi masyarakat di Bor. Selama pertempuran yang terjadi di Juba dan meluasnya wabah kolera, masyarakat di sana memiliki akses ke air bersih¹⁶ melalui instalasi pengolahan air sementara yang didirikan oleh ICRC. Dengan demikian, diluncurkannya sebuah proyek untuk membantu pihak berwenang dalam rangka memperkuat kapasitas mereka untuk memasok air bersih serta mengelola wabah kolera dengan cara yang lebih berkelanjutan.

Melalui dukungan dari ICRC, komunitas yang rentan menambah pasokan makanan mereka dan dapat memulihkan hingga mempertahankan swasembada mereka kembali sampai pada taraf tertentu. Banyak dari komunitas yang menciptakan inisiatif serupa untuk melindungi diri mereka sendiri dan mempertahankan mata pencaharian mereka, hal ini dilakukan dengan menerapkan alat-alat yang disediakan ICRC dan bantuan material lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat di sana.

Klinik di Sudan Selatan mempertahankan layanan mereka dengan program sumbangan pasokan medis dari

ICRC, pelatihan dan pengawasan staf, dan perbaikan infrastruktur untuk memperbaiki kondisi anggota staf dan pasien serta untuk memperluas kapasitas pelayanan kesehatan di Sudan Selatan. Tidak hanya penyandang disabilitas yang diberikan dukungan penuh oleh ICRC, para korban kekerasan seksual juga memperoleh layanan khusus termasuk perawatan profilaksis dalam waktu 72 jam setelah kejadian dan perawatan psikososial di beberapa klinik, yang didukung oleh ICRC dengan pelatihan dan perbekalan.

Dengan adanya dukungan dari ICRC, anggota keluarga yang terpisah memulihkan dan mempertahankan kontak melalui gerakan layanan tautan keluarga (*Movement's Family-Link Services*) yang disediakan ICRC. Layanan ini diberikan melalui pengiriman pesan keluarga dan panggilan telepon¹⁷.

Selain mengatasi warga sipil, ICRC juga menjalankan mandatnya bersesuaian dengan HHI yang berlandaskan Konvensi Jenewa 1949 No. 3 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang ataupun para tahanan. Untuk mendapatkan akses ke tahanan perang akibat konflik bersenjata, ICRC menjelaskan mandat dan prosedur kerjanya kepada pihak berwenang dan kelompok bersenjata selama pertemuan dengan mereka dan melakukan penindaklanjutan terhadap dugaan penangkapan¹⁸. Selama kunjungan yang dilakukan tersebut, delegasi ICRC melakukan pemantauan terhadap perawatan dan kondisi hidup para tahanan, termasuk akses mereka ke perawatan medis.

Bersama dengan Perhimpunan Nasional dan petugas kesehatan setempat, ICRC menjalankan kerjasamanya untuk memastikan keselamatan pasien dan petugas beserta fasilitas medis lainnya. Untuk menghindari hal-hal yang

¹⁶ ICRC *Annual Report* 2016. Loc., Cit., 196.

¹⁷ ICRC. "Restoring Family Links in Disasters." (August 2009): 7. Dilansir dari https://icrcndresourcecentre.org/wpcontent/uploads/2016/12/RFL_Disasters_and_After_Disasters_LR_1-1.pdf pada 16 Maret 2023.

¹⁸ ICRC *Annual Report* 2019, 129.

mengganggu keselamatan pasien dan petugas, maka dibuatlah tanda besar “tanpa senjata” yang dipasang di fasilitas kesehatan di komunitas yang terkena dampak kekerasan akibat konflik¹⁹. Rumah sakit yang terdapat di Sudan Selatan mempertahankan layanan kebidanan, anak, nutrisi, dan medis lainnya dengan berbagai bentuk dukungan yang didapatkan dari ICRC. Selain itu, warga sipil juga mendapat alat bantu dan layanan rehabilitasi fisik yang didukung ICRC di tiga pusat rehabilitasi fisik yang didukung ICRC di Juba, Rumbek, dan Wau.

Dalam melaksanakan peranannya, ICRC melangsungkan dialog bilateral rahasia yang bertujuan untuk mendesak pihak berwenang dan kelompok bersenjata semua pihak agar melindungi orang-orang yang tidak lagi berpartisipasi dalam suatu permusuhan. Selain itu, ICRC juga menekankan kepada mereka untuk memfasilitasi akses aman kepada warga sipil, pengungsi, termasuk staf kemanusiaan lainnya ke layanan esensial dan bantuan kemanusiaan.

Tantangan ICRC dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan

Akibat konflik sipil yang terjadi di Sudan Selatan menimbulkan kendala keamanan dan logistik yang menghambat kemampuan lembaga kemanusiaan dalam membantu masyarakat yang rentan, terutama di daerah pedesaan terpencil.

Sosialisasi ke lingkungan masyarakat tentang HHI merupakan salah satu cara ICRC berkomunikasi untuk membentuk kedekatan dengan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan mudahnya mobilisasi ICRC dalam menyelesaikan permasalahan kemanusiaan di sana. Untuk itu, pentingnya mengenali sebuah situasi dan lingkungan juga menjadi sebuah tantangan dari pelaksanaan tugas ICRC di

masyarakat. Adanya kemajemukan masyarakat dengan pola pikir yang berbeda-beda mengharuskan ICRC harus memiliki anggota yang terlatih dan cepat tanggap akan situasi.

Kendala keamanan dan kendala lainnya menghambat kemampuan organisasi kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang rentan, terutama di daerah-daerah terpencil. Lebih dari 28 pekerja kemanusiaan terbunuh termasuk satu anggota staf ICRC pada tahun 2017²⁰. Pekerja kemanusiaan dan *volunteer* tersebut mengalami kekerasan saat melaksanakan tugasnya di lapangan dengan mencegah transportasi yang mereka gunakan selama bertugas dan mengancamnya dengan menggunakan senjata²¹. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi ICRC untuk lebih memfokuskan pelatihan dan sosialisasi akan pemahaman HHI kepada kelompok bersenjata dan memfasilitasi akses yang aman bagi tenaga medis.

Banyaknya jumlah kelompok bersenjata pada tahun 2018 dengan munculnya 60 kelompok bersenjata²², hal ini menimbulkan konsekuensi yang semakin tinggi terhadap jumlah korban jiwa dan tantangan terhadap kemanusiaan. Selain itu, semakin banyak jumlah konflik bersenjata, maka dapat meningkatkan jumlah kekerasan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Analisis Peranan ICRC dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan

Berdasarkan analisis terkait ICRC *Annual Report* 2016-2019, dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian tujuan ataupun rencana aksi tahunan ICRC berada pada

¹⁹ Lara Haki, Erick Stover and Rohini J. Haar. “Breaking the Silence: Advocacy and Accountability for Attacks on Hospitals in Armed Conflict.” *International Review of the Red Cross (IRRC Journal)* 102, no. 915 (2020): 1214.

²⁰ ICRC *Annual Report* 2017, 198.

²¹ Patricia McIlreavy. “Enough is Enough. It’s Time to Protect Aid Workers.” (September 2016). Dilansir dari <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/sep/23/enough-is-enough-its-time-to-protect-aid-workers> pada 16 Maret 2023.

²² ICRC *Annual Report* 2018, 246.

level tinggi, dengan indikator semua program terlaksana dan terbilang stabil dalam menjalankan program-program di bidang kemanusiaan setiap tahunnya. ICRC dalam menjalankan misinya bersama mitra utama yaitu Palang Merah Sudan Selatan serta mendapat dukungan kerjasama dari Perhimpunan Nasional hingga mencapai target setiap tahunnya.

Berkaitan dengan fokus ICRC pada pelayanan kesehatan berkualitas tinggi, ICRC memberikan dukungan penuh melalui pembangunan klinik yang secara struktural mengalami peningkatan jumlah klinik yang tersedia setiap tahunnya (dalam rentang tahun 2016-2019). ICRC juga menyediakan layanan perawatan dan konseling kepada korban kekerasan seksual yang dianggap sangat efektif dari tahun ke tahun. Bahkan hal tersebut diakui dengan adanya laporan dari korban di mana program ini dapat meringankan tekanan psikososial mereka.

Dari tahun 2016-2019, jumlah personil ICRC semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya, tentunya hal ini dilakukan agar ICRC selalu siap siaga dalam menjalankan misinya di Sudan Selatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yang dirangkum penulis berdasarkan laporan tahunan ICRC dari tahun 2016-2019.

Pertambahan Personil ICRC Tahun 2016-2019

Tahun	Personnel (Mobile Staff)	Personnel (Resident Staff) – daily workers not included	Total
2016	179	649	828
2017	180	688	868
2018	181	742	923
2019	196	855	1051

Sumber: ICRC *Annual Report 2016-2019*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ICRC dari tahun ke tahun mengencangkan aksi siap siaga dalam menjalankan misi kemanusiaannya di

Sudan Selatan melalui penambahan personil agar menjamin keberhasilan setiap program kemanusiaannya. Pada hakikatnya, peran ICRC sudah terlihat efisien sejak tahun 2016, di mana ICRC juga melakukan aksi nyata dalam membangun pusat rujukan ortopedi untuk penyandang disabilitas di Waat hingga didukung penuh oleh ICRC dari segi teknis, material dan lainnya. Selain itu, lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari layanan pusat dibandingkan tahun 2015²³, di mana sebagian rujukan yang dilakukan tim ICRC menjangkau daerah terpencil, dan meningkatkan intensitas akan ketersediaan layanan dan perawatan.

Dari banyaknya program yang dilakukan ICRC di Sudan Selatan, terdapat program berkelanjutan berupa dukungan secara teknis dan material kepada masyarakat untuk mendapatkan kembali swasembada mereka. Dengan adanya dukungan penuh dari ICRC terhadap swasembada masyarakat dalam rentang tahun 2016-2019, memberikan dampak yang signifikan dan dapat menjamin keberlanjutan akan kebutuhan pangan mereka di masa depan.

SIMPULAN

ICRC telah hadir di Juba sejak 1980 hingga membentuk *South Sudan Red Cross* pada 2011 sejak kemerdekaan Sudan Selatan. Berdasarkan analisis terkait ICRC *Annual Report 2016-2019*, dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian tujuan ataupun rencana aksi tahunan ICRC berada pada level tinggi dan stabil dalam menjalankan program-program di bidang kemanusiaan setiap tahunnya. Selain menjalankan misi kemanusiaannya yang berlandaskan Konvensi Jenewa 1949, ICRC juga menjalankan beberapa program kemanusiaan di luar mandat hukum humaniter internasional. Hal ini dilakukan

²³ ICRC *Annual Report 2016*, Loc., Cit., 197.

karena kondisi yang muncul di suatu wilayah konflik membuat ICRC melakukan suatu gerakan kemanusiaan tambahan di luar mandatnya dalam HHI.

Adapun program kemanusiaan yang dilakukan ICRC diluar mandatnya dalam menegakkan HHI adalah ICRC memberlangsungkan program ketersediaan air bersih sehingga meminimalisir wabah kolera di Sudan Selatan hingga memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan swasembada mereka kembali untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan di masa mendatang. Ini menunjukkan bahwa ICRC dapat berperan serta dengan fleksibel dan menyesuaikan program-program kemanusiaan di luar mandat utamanya di suatu wilayah yang berkonflik seperti halnya Sudan Selatan.

Hakikatnya, secara teori, diplomasi menawarkan pendekatan-pendekatan yang bersifat khusus. Dalam aspek kemanusiaan, terdapat pendekatan humaniter yang dikenal dengan *humanitarian diplomacy*. Untuk itu, penanganan yang sesuai terkait isu kemanusiaan adalah dengan menggunakan diplomasi kemanusiaan.

Berdasarkan praktik lapangan, diplomasi kemanusiaan berlaku secara menyeluruh, artinya diplomasi yang dilakukan oleh ICRC terhadap Sudan Selatan dilakukan sebagai pendekatan yang secara tujuannya adalah kemanusiaan dan secara teknis juga melibatkan setiap orang yang ditangani dalam krisis kemanusiaan tersebut. Dengan demikian, komunikasi yang dibangun oleh ICRC ke Sudan Selatan ialah melalui pendekatan aspek kemanusiaan. Dalam konteks humaniter, ICRC berhasil menjalankan program-program kemanusiaannya untuk

menangani krisis kemanusiaan di Sudan Selatan pada tahun 2016-2019.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ambarwati, dkk. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), 126-127

JURNAL

Afriyie, Frederick Appiah et al. "Comprehensive Analysis of South Sudan Conflict: Determinants and Repercussions." *Journal of Liberty and International Affairs* 6, no. 1 (2020): 34-38.

Contreras-Urbina, Manuel et al. "Researching Violence Against Women and Girls in South Sudan: Ethical and Safety Considerations and Strategies." *Journal Conflict and Health* 13, no. 55 (2019): 3-4.

Guisolan, S. C. et al. "Health and Security Risks of Humanitarian Aid Workers During Field Missions: Experience of the International Red Cross." *Journal of Travel Medicine and Infectious Disease* 46, (2022): 1-2.

Haki, Lara, Erick Stover and Rohini J. Haar. "Breaking the Silence: Advocacy and Accountability for Attacks on Hospitals in Armed Conflict." *International Review of the Red Cross (IRRC Journal)* 102, no. 915 (2020): 1214.

Harroff-Travel, Marion. "The Humanitarian Diplomacy of the International Committee of the Red Cross." *Journal French in Relations Internationales*, no. 121 (Januari-Maret 2005): 4-5.

Isnarti, Rika. "A Comparison of Neorealism, Liberalism, and Constructivism in Analysing Cyber War." *Andalas Journal of International Studies* 5, no. 2 (2016): 155-157.

Mayai, Agustino Ting. "War and Schooling in South Sudan." *Journal on Education in Emergencies* 8, no. 1 (2022): 15.

Zambakari, Christoper D. "Crisis of Youth or Crisis of Society in South Sudan?." *SSRN Electronic Journal*, no. 635 (Juni 2013): 3.

LAPORAN

ICRC *Annual Report* 2016

ICRC *Annual Report* 2017

ICRC *Annual Report* 2018

ICRC *Annual Report* 2019

PAPER

Mujahadah. "Upaya ICRC dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional di Sudan Selatan pada Tahun 2013-2018." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2019): 6-7.

Silva, Candida. "From Principles to Actions? An Analysis of The (in) Coherence in the Responses of The International Community to

The Humanitarian Crises in Yemen and South Sudan." (2018): 14.

WEBSITE

ICRC. "South Sudan: World's Newest Country Signs Up to the Geneva Conventions." (2012), Dilansir dari <https://www.icrc.org> pada 20 Februari 2022.

ICRC. "Restoring Family Links in Disasters." (August 2009): 7. Dilansir dari https://icrcndresourcecentre.org/wpcontent/uploads/2016/12/RFL_Disasters_and_After_Disasters_LR_1-1.pdf pada 16 Maret 2023.

McIlreavy, Patricia. "Enough is Enough. It's Time to Protect Aid Workers." (September 2016). Dilansir dari <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/sep/23/enough-is-enough-its-time-to-protect-aid-workers> pada 16 Maret 2023.